

PERILAKU POLITIK SANTRI PADA PILKADA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020: STUDI PADA PESANTREN TRADISIONAL DAN PESANTREN MODERN

Fitria Barokah* dan Robi Cahyadi Kurniawan

Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, Lampung University.
Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: fitriabarokah84@gmail.com, robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Perilaku politik adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Santri yang berada di pesantren memiliki kendala mengakses informasi dari luar terutama terkait pilkada yang akan dilaksanakan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi perilaku politik dalam menentukan pilihan politik santri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perilaku politik santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sebagai pesantren tradisional dan di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin sebagai pesantren modern dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku politik, pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, santri memberikan pertimbangan pilihan politiknya dengan melihat agama kandidat, organisasi masyarakat dan partai yang berbasis Islam. Kepatuhan santri kepada kiai sangat kuat dalam menentukan pilihan politik, sehingga kiai menjadi rujukan utama dalam menentukan pilihan politik, dan santri tidak memiliki keberanian menentangnya. Berbeda dengan santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, santri terlihat lebih rasional, memilih dengan pilihannya sendiri dan kiai tidak menjadi sumber utama menentukan pilihan politik.

Kata kunci: Santri; Kiai; Tradisional; Modern; Pilkada

ABSTRACT. Political behavior is a behavior or actions taken by individuals or groups to fulfill their rights and obligations as political people. Santri who are in Islamic boarding schools have problems accessing information from outside, especially regarding the elections to be held, so that it is likely to influence political behavior in determining students' political choices. This study aimed to discuss the political behavior of students at Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame as a traditional boarding school and at Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin as a modern boarding school in the Election of Regent and Deputy Regent of South Lampung in 2020. This research is a qualitative research, in which purposive sampling techniques was used to determine the informants by adjusting the data needs for research purposes. The researcher were used observation, interviews and documentation in collecting the data. The results showed that there were differences in political behavior; at Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, students considered their political choices by looking at the religion of candidates, community organizations, and Islamic-based parties. The obedience of the santri to the kiai is very strong in making political choices, so that the kiai becomes the main reference in making political choices, and the santri do not have the courage to oppose it. In contrast to the students at the Ushuluddin Integrated Islamic Boarding School, the students appear to be more rational, choose with their own choices and the kiai is not the main source of determining their political choices.

Keywords: Santri; Kiai; Traditional; Modern; Public Election

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk perubahan demokrasi dan juga akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas dan menghimpun banyak kepercayaan terhadap calon kandidat. Banyak indikator yang dapat mempengaruhi perubahan perolehan suara yang diraih oleh kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seperti elektabilitas kandidat, *money politic*, dan permainan isu suku, agama, ras antargolongan (SARA). Indikator lainnya yaitu disebabkan oleh keterlibatan santri dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Tahun 2020 merupakan awal kelam yang dihadapi masyarakat Indonesia, adanya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjadikan sebuah bencana

nasional terutama pada perpolitikan Indonesia. Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal. Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Sebagai antisipasi penyebaran covid-19, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 (Sarjan et al, 2020).

Ada beragam pendapat tentang pengertian santri, diantaranya pendapat Abu Hamid. Menurutnya, kata *santri* merupakan gabungan dua suku kata,

yaitu *sant* yang berarti manusia baik dan *tra* yang artinya suka menolong. Dalam konteks ini, istilah santri dipahami sebagai kumpulan individu-individu terdidik (khususnya dalam ilmu-ilmu keagamaan) yang memiliki peran nyata dalam bidang sosial-kemasyarakatan (Nasaruddin, 2019).

Keterlibatan santri dalam politik praktis sebenarnya merupakan bagian kecil wajah lama dari konfigurasi politik nasional pasca-Reformasi. Namun, semenjak Orde Baru tumbang geliat politik santri marak mewarnai panggung perebutan kekuasaan. Peran politik santri dalam dinamika politik nasional bisa dikembangkan menjadi lebih produktif. Pergeseran interpretasi dan ajaran otentik akan membuka dialog dan komunikasi politik santri dengan konstituen dari rakyat pemilih yang dalam kategori Geertz tergolong priyayi dan abangan menjadi lebih konstruktif. Melalui proses demikian, aktivis politik santri dan partai Islam mengembangkan kebijakan dan program politik yang lebih memihak kepentingan publik rakyat pemilih. Dari sini dikembangkan praktik politik santri sebagai transformasi keberagamaan bagi penumbuhan kehidupan politik lebih demokratis dan pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi mayoritas rakyat yang mayoritas muslim (Ilham, 2020).

Pada kancah perpolitikan Indonesia, santri masih menjadi persoalan yang penting dilakukan, terutama bagi perkembangan strategi budaya dan kebijakan bagi politik santri dalam memenangkan cita-cita besar politik bagi kepentingan bangsa terutama kepentingan Islam yang lebih universal. Dunia santri adalah sebuah komunitas yang sarat dengan variasi karakter. Jika merujuk pada kamus bahasa Indonesia, akan ditemukan definisi santri sebagai orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Secara khusus, hubungan tersebut tidak akan pernah terlepas dari fenomena-fenomena umum yang muncul dalam dunia *konvensional*. Terhadap panggung perpolitikan, misalnya, seorang santri tidak bersikap acuh tak acuh, karena politik bersifat global yang menjalar setiap matra kehidupan, termasuk kehidupan santri. Walaupun dalam frekuensi kecil dan tidak langsung, peran santri tidak dapat dikecilkan apalagi dikucilkan begitu saja (Asmani dalam Ilham, 2020).

Muhammadiyah dikenal sebagai salah satu pendidikan agama berbasis modern, sedangkan NU (Nahdlatul Ulama) tetap menjaga pendidikan tradisional yang berfokus pada pendidikan agama daripada pendidikan umum. Kesenjangan (*gap*) antara Muhammadiyah sebagai kelompok reformis dan NU sebagai kelompok tradisionalis adalah lahirnya Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur pada tahun 1926 yang mengkombinasikan pendidikan kitab klasikal dengan konsep pendidikan

modern dengan semangat reformasi, hal itu yang menjadi contoh bagaimana orientasi pendidikan modern membentuk sistemnya sendiri (Bruinessen, 2008). Slogan unik yang sudah mendunia dan mengidentikkan Gontor berdiri diatas semua golongan atau tidak berafiliasi kepada golongan manapun. Pondok Modern Darussalam Gontor bersikap “Islam moderat puritan” (*puritanical moderate* Islam) dengan kaca mata Islamisasi politik dalam menghadapi isu-isu kontemporer termasuk Islam politik atau Islamisme yang diselimuti dengan berbagai macam ideologi.

Seiring dengan perkembangan modernisasi proses pendidikan pesantren, lembaga keagamaan yang dahulunya dikenal tradisional dan menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kiai kini sebagian telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga pesantren modern dan menganut sistem yang lebih demokratis dan rasional. Hal tersebut di dukung oleh pendapat Zainuddin Syarif yang menjelaskan bahwa kegiatan politik kalangan pesantren tidak selamanya monolitik dan hegemonik, namun sudah mengalami proses dinamisasi yang lebih demokratis dan rasional. Seperti ketidakpatuhan santri terhadap kiai biasa dilakukan oleh alumni pesantren sendiri yang secara intelektualitas lebih terdidik dan relatif mempunyai keterbukaan wawasan, baik karena tempaan pendidikan formal, atau karena sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Bahkan tak jarang kita temui, kiai-santri sama-sama dalam satu wadah organisasi keagamaan yang tentu saja mempunyai persepsi yang sama terhadap ajaran agamanya, tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam berpolitik (Syarif, 2016).

Perilaku politik dapat diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat diantara lembaga pemerintah, kelompok-kelompok dan individu di dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik (Surbakti, 2010). Pendapat lain mengatakan perilaku politik dapat dibagi menjadi dua bagian pokok yakni: *pertama* perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, *kedua* perilaku politik warga negara biasa, baik sebagai individu maupun kelompok (Sitepu, 2012).

Perilaku politik santri adalah bentuk tindakan dimana ada perilaku yang sengaja ditampilkan atau ditunjukkan berkaitan dengan kepentingan politik. Menurut Syarif (2012) pola hubungan kiai-santri tersebut dapat ditemukan pola perilaku politik santri yang dipetakan menjadi tiga yaitu *Pertama*, santri patuh mutlak, Santri dalam kehidupan sehari-hari menyerap informasi dan nilai-nilai sepenuhnya dari kiai dalam aspek perilaku moral keagamaan, intelektual, dan sosial. *Kedua*, santri patuh semu yaitu santri dengan sikap *ketawaduan* terhadap kiai

dalam aspek moral keagamaan, intelektual, dan sosial. Fenomena ini ditandai dengan gejala bahwa santri telah berusaha menyerap informasi yang datang dari luar (kiai atau pesantren), atau dengan kata lain, dalam diri santri telah terdapat ruang bebas dan rasional untuk menafsirkan informasi yang datang dari luar. Gambaran praktisnya apa yang dilakukan oleh santri terhadap keinginan kiai tidak semuanya mencerminkan kehendak dan kesadaran perilakunya. Hal ini disebabkan oleh kungkungan situasi, dan posisi yang mengitarinya.

Ketiga, santri prismatic merupakan santri yang telah mengalami proses transisi dari sikap tradisional menuju modern. Santri sudah tidak memperlakukan kiai sebagai pusat informasi tunggal dalam hal persoalan politik, sehingga peran kiai bukan lagi *polymorphic* tetapi *monomorphic*. Contoh nyata dalam urusan politik santri sudah tidak lagi menggunakan kiai sebagai sumber rujukan (referensi) dalam menentukan aspirasi politiknya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, Peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian dari Syarif (2016) tentang Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura. Penelitian ini mengkaji bagaimana perilaku politik santri politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020 pada dua pondok pesantren yang memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sebagai Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang masih sangat tradisional, dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin sebagai pondok pesantren yang berdiri di atas semua golongan dan sudah memasukan unsur modern. Teori yang digunakan yaitu teori perilaku politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, dan pendapat dari Zainuddin Syarif tentang Pola Perilaku Politik Santri.

Pemilihan kedua pondok pesantren dalam penelitian ini peneliti melihat pada dua aspek argumentasi. *Pertama*, yaitu pondok pesantren Terpadu Ushuluddin merupakan pondok pesantren yang berkeblat pada Gontor. Kita ketahui Gontor merupakan pencetus pertama adanya pondok pesantren modern di Indonesia dan berdiri atas nama semua golongan tanpa adanya afiliasi kepada pihak manapun. *Kedua*, Pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame merupakan pondok pesantren yang masih menggunakan model pembelajaran tradisional dan masih mempertahankan sistem pesantren yang pertama kali disebarkan oleh para Walisongo sekitar abad 15-16 M. Pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) dan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, dengan rincian yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang berada pada 18 Provinsi di Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mengusung tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh beberapa partai politik, dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Data Sekunder yang diolah oleh peneliti dari medianusantaranews.com tahun 2020

Gambar 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020-2025

Lampung Selatan memiliki pesantren-pesantren unggulan, hal ini mengacu pada Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) sebanyak 44 pesantren dan santri sebanyak 10.141 orang yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan memiliki jumlah santri mukim terbanyak kedua setelah Lampung Timur. Sebagian besar pondok pesantren di Lampung Selatan mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Selatan tahun 2020 diantaranya yaitu pondok pesantren Assalafiyah dan pondok pesantren terpadu Ushuluddin. Pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Selatan 2020 menjadi kewajiban santri yang sudah memiliki hak suara untuk ikut dalam persta demokrasi tersebut (Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama, 2019).

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus dua jenis pondok pesantren dalam penelitian ini, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern memungkinkan terjadinya perbedaan sikap politik dan kemudian dapat menggambarkan pilihan politik politik santri. Santri yang berada di pesantren akan sulit mengakses informasi dari luar terutama terkait pilkada yang akan dilaksanakan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi perilaku politiknya. Maka itu, penelitian ini ingin mengetahui masalah perilaku politik memilih dari kalangan santri pesantren tradisional yaitu Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, dengan santri pesantren modern yaitu Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung

pada pengamatan (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, semi terstruktur dengan santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin. Selain data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengambilan informan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri dari :

1. Pengasuh pondok pesantren untuk mencari informasi mengenai pandangan pimpinan pondok pesantren terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.
2. Santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin yang sudah memiliki hak pilih, untuk mencari informasi terkait politik santri serta dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.
3. Alumni, untuk mendukung data santri dan meneliti lebih lanjut mengenai pandangan santri yang sudah menjadi alumni terhadap keterkaitannya dengan pesantren dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

Data kemudian divalidasi menggunakan uji kredibilitas, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Selain itu, dilakukan uji keteralihan (*Transferability*), Peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin

a. Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame

Definisi pondok pesantren tradisional dikemukakan oleh Geertz (1981) mengemukakan bahwa Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia memang melestarikan nilai-nilai edukasi berbasis pengajaran tradisional atau salaf. Pelestarian akan sistem dan metodologi tradisional itulah yang lantas menjadikan pesantren model ini disebut sebagai pesantren tradisional. Sejalan dengan pendapat dari (Sudahri, 2018: 130) bahwasanya pesantren tradisional, yaitu pesantren yang masih menganut prinsip tata kelola kelembagaannya dengan model dan tata-cara lama, siklus tradisi secara natural bersifat turun temurun dan masing-masing penerus kecenderungan tetap mempertahankan cara-cara lama termasuk di

dalamnya dalam teknik pembelajaran keagamaan.

Sebagian besar santri pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame. Berasal dari berbagai daerah. Mayoritas anak-anak seorang petani, pedagang, dan nelayan. Menurut Cecep Badruddi, Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame merupakan salah satu pondok pesantren *salafiyah* yang berafiliasi kepada NU (Nahdlatul Ulama) dan bisa dikatakan pondok pesantren tradisional terlihat dari segi kurikulum dan pengajarannya masih menggunakan metode tradisional tanpa adanya campuran pendidikan formal. Jumlah santri pada pesantren Assalafiyah sekitar 300 orang yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dari 300 santri, sebanyak 150 santri yang berdomisili di Lampung Selatan, dan terdapat 50 santri yang sudah mempunyai hak untuk memilih baik pada pemilu atau pilkada. Pesantren *salafiyah* merupakan pesantren tradisional yang mengkaji kitab-kitab Syafi'iyah dalam bidang usul fikih dan fikih, kitab-kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang tauhid, dan kitab-kitab Al-Gazali dalam bidang filsafat dan tasawuf. Mayoritas pesantren ini didirikan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU).

b. Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin

Pondok pesantren terpadu Ushuluddin termasuk dalam model pondok pesantren modern, menurut Nizar dalam Katon (2020: 79) mengenai pesantren modern merupakan pesantren yang terbuka untuk umum, corak pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Materi pelajaran dan sistem pembelajaran sudah menggunakan sistem modern dan klasikal. Pesantren modern sangat memperhatikan terhadap mengembangkan bakat dan minat santri sehingga santri bisa melatih diri sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Hal yang tidak kalah penting adalah keseriusan dalam penguasaan bahasa asing, baik bahasa arab maupun bahasa Inggris.

Pondok pesantren terpadu Ushuluddin merupakan salah satu pondok pesantren di Lampung Selatan yang berkiblat pada Gontor, baik dari kurikulumnya maupun ideologinya yaitu berdiri pada semua golongan dan tidak berafiliasi dengan Ormas atau partai politik manapun. Ushuluddin memiliki santri sebanyak 379 dan mengkombinasikan pendidikan dakwah, bahasa asing dan tahfidz Qur'an. Keunggulan lain dari pondok pesantren Ushuluddin adalah sudah bekerja sama dengan lembaga beasiswa, seperti Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama, dan lembaga beasiswa Timur Tengah.

Dilihat dari sejarahnya, munculnya modernisasi dalam praktek pendidikan Islam di Indonesia tidak

bersumber dari kalangan Islam sendiri, melainkan terinspirasi dari Belanda. Pendidikan dengan sistem yang lebih modern justru diperkenalkan oleh Belanda melalui perluasan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan pada paruh kedua abad ke-19. Hal sejalan juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid bahwa meskipun ada kesan terpaksa karena desakan komunitas internasional yang mengecam sikap pemerintahan kolonial yang eksploitatif, program pendidikan bagi kaum pribumi ini diimplementasikan pemerintah kolonial Belanda dengan cara mendirikan *volkschoolen* atau lebih dikenal dengan istilah sekolah rakyat (Azra dalam Madjid, 1997).

Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2020.

a. Perilaku Politik Santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame

Perilaku memilih merupakan bagian dari perilaku politik. penjelasan mengenai pola perilaku politik santri pada masing-masing pondok pesantren. Perilaku memilih santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor organisasi yang sama sangat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Hal tersebut karena hampir semua informan di pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sangat terpengaruh oleh kelompok sosial atau organisasi yang diikuti seperti organisasi masyarakat dan kalangan pesantren. sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sulaiman:

“Jika ada, saya milih yang latar belakangnya ormas Islam dan untuk saat ini pilih partai yang besar aja itu PKB ajalah, kita percaya saja sama NU, mudah-mudahan kepercayaan ini tidak sia-sia”

Perilaku memilih santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, pada umumnya menjadikan aspek agama dan adab dalam faktor organisasi sangat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Pernyataan santri dikemukakan oleh Tuhfatul Mardiah sebagai berikut :

“Saya mau dukung yang penting gimana agamanya saja, jika islamnya bagus ya saya dukung kandidat itu”.

Diperkuat oleh pernyataan Sulaiman yang menjelaskan bahwa :

“Dalam Islam juga diperintahkan bahwa memilih pemimpin itu suatu kewajiban. Intinya ya santri ini sangat berperan soalnya jika kita salah milih pemimpin, kita jaga yang dirugikan. Dan yang kita harapkan sih pemimpin itu yang se-iman se-

agama karena sesuai dengan dalam Al-Quran juga jika memilih pemimpin itu harus yang Islam karena kita di Indonesia ini mayoritas Islam. Pokoknya kita dahulukan dulu agamanya, setelah udah agamanya, ya dia mau jujur atau tidak ya itu tanggung jawab pemimpin itu, yang penting jangan sampe memilih non muslim”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 menunjukan dalam menentukan pilihan politiknya tidak lagi rasional. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang mempunyai kecenderungan santri di pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sangat terpengaruh oleh kelompok sosial organisasi yang diikuti seperti organisasi masyarakat dan kalangan pesantren.

Sejalan dengan pendapat Surbakti (2010), pendekatan sosiologis menjelaskan perilaku politik santri yang kemudian menghasilkan perilaku memilih menekankan pada dua aspek yaitu pengelompokan sosial dan karakteristik, kedua faktor tersebut menjadi faktor yang mampu mempengaruhi dukungan politik dan pilihan pemilih terhadap keputusannya untuk memilih kandidat. Penelitian ini menjelaskan pendekatan sosiologis terutama pada karakteristik sosial masih berpengaruh bagi pemilih santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, yaitu adanya faktor kesamaan agama, termasuk keagamaan kandidat yang dipandang baik oleh santri. Setiap santri pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame masih mempertimbangkan agama kandidat dalam menentukan pilihannya. Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame memperlihatkan bahwa keagamaan kandidat menentukan pilihan santri.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh santri terkait pilkada menjadikan santri hanya mengikuti pilihan kiai. Keterbatasan pengetahuan politik dan kepatuhan santri terhadap sosok kiai sebagai pemimpin mutlak di pesantren, santri di pondok pesantren tradisional yaitu Assalafiyah Tanjung Rame akan mengikuti pilihan kiai jika ada dihimbau oleh kiai untuk memilih salah satu paslon. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Sulaiman :

“Jika ada himbauan untuk memilih salah satu paslon yang layak, ya kami selaku murid dan santri mengikuti apa kata guru, dan mayoritas disini mengikuti pilihan kiai”.

Penelitian ini menunjukan santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung menggambarkan fenomena perilaku politik santri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang sangat dipengaruhi oleh kiai sebagai

tokoh panutan dalam menentukan dukungan dan pilihan politik. Sejalan dengan Surbakti (2010) bahwa pendekatan psikologis menekankan kepada pemilih menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilihan umum dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan ikatan emosional pemilih dengan figur kandidat dan ketokohan, dilihat dari calon atau tokoh dibelakang calon dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.

Pada faktor ketokohan dalam mempengaruhi pilihan politik yang berkembang di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame menjelaskan bahwa kiai masih sangat berpengaruh dalam memberikan saran pada pemilih santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dalam menentukan pilihan politiknya. Kiai masih menjadi rujukan dalam menentukan pilihan politik tanpa ada faktor lain yang mempengaruhi pilihan santri. Hal tersebut sangat berakibat pada penentuan pilihan politik santri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa pemilih santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sangat menempatkan kiai sebagai faktor ketokohan dalam menciptakan ikatan emosional pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Kondisi di atas menunjukkan bahwa santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame kurang mempertimbangkan rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya dan akhirnya hanya mempertimbangkan agama, ketokohan kiai.

b. Perilaku Politik Santri Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin

Perilaku politik santri Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin menunjukan kebanyakan santri tidak terpengaruh oleh pilihan lingkungan sosialnya seperti organisasi yang diikutinya dan kiaiinya. Santri sudah memasuki pada kategori pemilih cerdas karena pilihan politiknya bukan hanya berdasarkan pertimbangan lingkungan sosial saja, ada juga yang menjadi pemilih yang demokratis. Meski demikian, ada juga santri yang kritis terhadap pilihannya dikarenakan melihat keadaan politik sekarang.

Penelitian ini menggambarkan santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin telah mengalami proses transisi dan perubahan yang signifikan menggambarkan ciri khas santri modern sebagai pemilih cerdas dan rasional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya seperti organisasi yang diikutinya dan kiaiinya dalam menjatuhkan pilihan politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Mutmainnah, sebagai berikut:

“Tidak, ya partai apa aja dan dari ormas mana aja, yang penting terbaik buat masyarakat”

Fenomena karakteristik sosial tidak terjadi di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dikarenakan santri yang mulai berfikir rasional sehingga santri sebagai pemilih tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan dalam memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020. Agama tidak dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan pilihan politik disebabkan santri sudah mengalami perubahan pola pikir menjadi lebih maju dan kritis, sehingga kebanyakan pemilih tidak menjadikan agama seorang kandidat sebagai pilihan, akan tetapi yang peduli dengan masyarakat sekitar. Tidak menjadi hal yang mengherankan jika agama menjadi dasar pertimbangan bagi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Santri modern di Pondok Pesantren terpadu Ushuluddin menampilkan perbedaan dengan santri tradisional pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame yaitu pola pikir santri modern tidak mengantungkan pilihan politik berdasarkan ketertarikan semata dengan kandidat dan ketokohan kiai sebagai panutan dalam memilih. Berikut diuraikan pernyataan beberapa informan santri yang dikemukakan oleh bahwa:

“Enggak ikut mudir, karena kita punya pilihan masing-masing, tergantung kita sendiri, mudir (kiai) milih itu mungkin menurut mudir itu yang terbaik belum tentu menurut kita baik”

Identifikasi ketokohan kiai menjadi fokus pada penelitian ini. Pada faktor ketokohan, santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin diketahui bahwa peran tokoh kiai tidak memberikan lagi pengaruh dalam memberikan saran pada santri dalam menentukan pilihan politiknya, hal tersebut secara otomatis juga tidak memberikan dampak pada sikap penentuan pilihan politiknya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih dari kalangan santri Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin tidak mengantungkan pilihan politik berdasarkan ketertarikan semata dengan kandidat dan ketokohan kiai sebagai panutan dan preferensi dalam memilih. Santri mulai berfikir kritis dengan melihat prestasi masing-masing kandidat yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, terdapat santri juga yang lebih mementingkan kesejahteraan kalangan pesantren sebagai faktor dalam mempertimbangkan pilihan politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020.

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih dimana pemilih akan pertimbangan untung dan rugi yang kemudian digunakan untuk membuat

keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih akan memberikan kebaikan atau sebaliknya (Surbakti, 2010). Santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin menunjukan pemilih rasional dan terbilang pemilih cerdas. Hal tersebut disebabkan santri tidak menjadikan kiai ormas atau partai sebagai acuan dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, kiai tidak lagi menjadi sumber utama perilaku politik santri.

Perilaku Politik Santri Berdasarkan Kepatuhan

Kepatuhan santri dengan kiai karena adanya ikatan guru dan murid yang sedang berlangsung. Ikatan moral tersebut kemudian mengarah pada kepatuhan dalam berpolitik. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh santri Assalafiyah Tanjung Rame bahwa:

“Pokoknya saya ikut abah, apa yang menurut abah baik, ya saya ikut saja, karena abah yang lebih tahu mana yang baik mana yang tidak”.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan santri pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame memperlihatkan bahwa santri mukim menunjukan sikap patuh terhadap pilihan dari kiai dan menganggap pilihan kiai sebagai pilihan terbaik termasuk menjadikan pilihan kiai rujukan dalam memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020, sedangkan santri sebagai seseorang yang hanya bisa meminta pendapat dan arahan kiai. Berdasarkan hasil wawancara, jawaban santri termasuk jawaban mayoritas santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame yang masih kental dengan ketakdzimannya kepada kiai.

Kepatuhan santri dianggap sangat mutlak sejalan dengan pendapat Syarif (2012) mengkategorikan santri patuh mutlak yaitu dimana dalam kehidupan sehari-hari santri menyerap informasi dan nilai-nilai sepenuhnya dari kiai dalam aspek perilaku, moral keagamaan, intelektual, sosial, termasuk politik. Pandangan kiai dan perkataan dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak dan kiai menjadi sumber rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-hari santri..

Penelitian ini menunjukan bahwa santri dengan kategori patuh mutlak hanya terjadi di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame. Kepatuhan santri dalam berpolitik terlihat santri aktif akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi pilihan politik kainya. Santri pondok pesantren Assalafiyah Tanjung Rame menunjukan sikap patuh mutlak terhadap pilihan dari kiai dan menganggap pilihan kiai sebagai pilihan terbaik termasuk menjadikan pilihan kiai rujukan dalam memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020, sedangkan santri sebagai seseorang yang hanya bisa meminta pendapat dan arahan kiai.

Kepatuhan yang mutlak disebabkan adanya taklid dan takdzim yang ada dalam diri santri. Taklid sebagai sikap percaya bulat-bulat terhadap kata orang, menurut, meniru atau meneladani orang lain seperti kiai. Taklid dalam pesantren Assalafiyah Tanjung Rame ditandai dengan sikap menerima secara penuh perkataan kiai, dan sangat meneladani figur kiai di pesantren. Selain taklid, penelitian ini melihat bahwa kiai di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sangat memiliki kharisma yang begitu tinggi, sehingga santri bersikap takdzim kepada kiai. Perilaku takdzim diartikan sebagai perbuatan dan sikap yang mencerminkan penghormatan seorang kiai. Bentuk penghormatan diyakini santri akan membawa keberkahan bagi santri. Barokah kiai tersebut akan memberikan kebaikan bagi diri santri baik dari aspek keilmuan santri maupun aspek lainnya, sehingga santri akan berlomba-lomba untuk mendapatkan barokah dari kiai dengan sikap takzim yang diterapkan dalam kehidupannya di pesantren. Oleh karena itu, dengan sikap taklid dan takdzim tersebut tidak heran jika santri di pesantren Assalafiyah Tanjung Rame ini sangat patuh terhadap kiai baik dalam urusan keagamaan, intelektual, sosial, maupun pilihan politik.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah mencapai umur 17 tahun memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dalam setiap perhelatan pemilihan baik tingkat lokal maupun nasional. Namun, budaya patuh santri kepada kiai di pesantren-pesantren masih melekat kuat. Santri yang sangat patuh terhadap kiai lebih percaya pilihan politik kainya daripada pilihan politiknya karena terdapat kungkungan moral yang tumbuh di lingkungan pesantren.

Gambaran praktisnya, apa yang dilakukan oleh santri terhadap keinginan kiai tidak semuanya mencerminkan kehendak dan kesadaran perilakunya. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan santri yang berada di Pesantren Tradisional Assalafiyah Tanjung Rame dan Terpadu Ushuluddin. Pernyataan dikemukakan santri Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame bahwa:

“Jika pilihan saya berbeda dengan abah pasti ada rasa kecewa dan sedih, Hanya jika abah mengarahkan untuk memilih salah satu paslon ya kita ikut abah, mungkin abah yang lebih mengerti mana calon yang terbaik”.

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ade Uswatun Hasanah, bahwa :

“Jika pilihannya dengan abah, ya ada rasa tidak enak hati, sebab saran dari guru tidak enak hati jika diabaikan, dan balik lagi, tetep ikut pilihan abah saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa santri pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung

Rame menunjukkan bahwa santri patuh karena posisi yang mengitarinya. Walaupun santri memiliki pilihan politik sendiri tetapi santri lebih percaya dengan pilihan politik kiai karena kungkungan moral yang mengitarinya dan mempercayai pilihan terbaik kepada kiai. Pada santri tradisional terlihat pemikiran bahwa semakin tinggi keinginan santri untuk mengikuti permintaan atau perintah kiai menggambarkan kuatnya derajat keterikatan santri terhadap kiai, sehingga santri yang merasa kesulitan melepaskan diri dari kekuatan otoritas dapat menghambat kemandirian emosi dan nilai khususnya pilihan politik.

Sejalan dengan pendapat Zainuddin Syarif, santri yang dikategorikan sebagai santri patuh semu terlihat dari sikap ketawaduan terhadap kiai dalam aspek moral keagamaan, intelektual, dan sosial termasuk politik yang ditandai dengan gejala bahwa dalam diri santri telah terdapat ruang bebas dan rasional untuk menafsirkan informasi yang datang dari luar. Contohnya, santri mengikuti politik kiai, pada dasarnya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak politik yang sebenarnya, karena sebetulnya santri mempunyai pandangan dan pilihan politik sendiri tapi santri tidak berani melakukan pilihan politiknya karena kungkungan moral yang mengitarinya (Syarif, 2012).

Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame memiliki pemikiran bahwa semakin tinggi keinginan santri untuk mengikuti permintaan atau perintah kiai menggambarkan kuatnya derajat keterikatan santri terhadap kiai dan mendapatkan berkah dari kiai, sehingga santri yang merasa kesulitan melepaskan diri dari kekuatan otoritas kiai dan dapat mempengaruhi pilihan politik santri.

Santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin sudah tidak memperlakukan kiai sebagai pusat informasi tunggal dalam hal persoalan politik. Contoh nyata dalam urusan politik santri sudah tidak lagi menggunakan kiai sebagai sumber rujukan (referensi) dalam menentukan aspirasi politiknya. Hal tersebut diperlihatkan oleh beberapa informan santri di Pondok Pesantren terpadu Ushuluddin bahwa:

“Dalam pilihan politik, saya tidak ikut mudir, karena kita punya pilihan masing-masing, tergantung kita sendiri, mudir milih itu mungkin menurut mudir itu yang terbaik belum tentu menurut kita baik”.

Tidak hanya santri yang masih belajar di pesantren, kepatuhan politik juga tidak terjadi pada santri yang sudah menjadi alumni. Alumni tidak mempermasalahkan perbedaan antara pilihan politiknya dengan pilihan politik kiai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terkait apakah ketika sudah menjadi alumni akan mengikuti pilihan politik kiai, pernyataan disampaikan oleh Alumni Umi

Farinda sebagai Alumni Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin :

“Secara spesifik saya tidak akan mengikuti pilihan mudir jika mudir menyuruh saya memilih salah satu calon. Akantetapi mudir memberi wawasan kepada santri mengenai kandidat. Misalnya mudir memberikan pandangan mengenai calon A dan calon B, karena memang akses pesantren sangat terbatas dalam mencari informasi tentang politik”.

Berdasarkan pernyataan diatas, pendidikan politik merupakan salah satu ragam pendidikan yang ditumbuh kembangkan di pondok pesantren. Kiai memberikan kebebasan dan memberikan arahan santri agar mampu memanfaatkan hak pilih santri dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Hal ini di dukung oleh budaya kebebasan berpendapat bagi santrinya agar dapat mengembangkan pemikiran santrinya yang lebih kreatif, inovatif, demokratis terlihat dari berbagai ekstrakurikuler yang diajarkan di pesantren modern terutama Pondok Pesantren Modern Terpadu Ushuluddin. Hal ini berdampak pada pola berfikir santri maupun alumni yang mulai rasional dalam menentukan pilihan politik.

Menurut Syarif (2012), santri seperti yang disebutkan diatas dikategorikan sebagai santri prismatic yaitu santri telah mengalami proses transisi dari sikap tradisional menuju modern. Santri sudah tidak memperlakukan kiai sebagai pusat informasi tunggal dalam hal persoalan politik, sehingga dalam urusan politik santri sudah tidak lagi menggunakan kiai sebagai sumber referensi dalam menentukan aspirasi politiknya.

Penelitian menunjukkan bahwa santri yang termasuk kategori santri prismatic terdapat pada santri modern di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin. Hal tersebut disebabkan santri berfikir rasional, kritis, dan demokratis sehingga dalam pilihan politik kiai berbeda dengan apa yang menjadi pilihan politik santri. Hasil wawancara menunjukan bahwa santri tetap dengan pilihan sendiri walaupun kiai tidak merekomendasikan untuk memilih salah satu kandidat. Oleh karena itu, sekalipun terjadi perbedaan dan pembangkangan politik, mereka tidak begitu saja melepas ikatan guru dan murid dengan kainya.

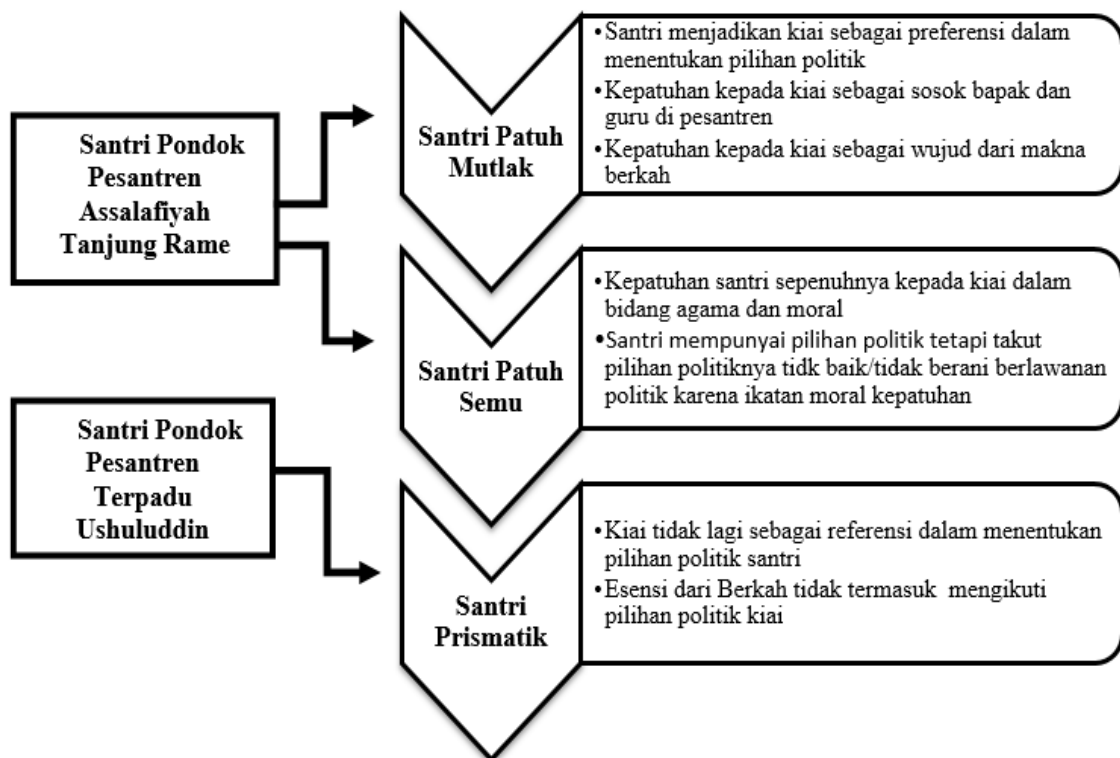
Santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin termasuk pemilih yang rasional atau tidak mengikuti arahan dari apa atau siapapun dalam menentukan pilihan politiknya, termasuk kiai. Pola pikir dari santri prismatic ini tidak lagi terkungkung oleh lingkungan pesantren atau budaya taklid kepada kiai. Santri mampu berfikir lebih objektif dan rasional dalam menentukan sesuatu, hal tersebut disebabkan beberapa

hal yang mendukung santri mengalami transisi menjadi santri modern yaitu tempaan pendidikan formal dan budaya yang mengelilingi pesantren. Berbeda dengan pesantren tradisional, dilihat dari metode pembelajarannya, di pesantren modern di mana referensi kitab kuning tidak lagi menjadi referensi utama, peranan kiai pun menjadi berkurang, sebab dalam penyampaian ilmu agama atau bahkan ilmu *non* agama biasanya tidak disampaikan langsung oleh kiai. Hal ini menyebabkan fungsi dan peran kiai sebagai pewaris ilmu di masa keagungan Islam dahulu tidak lagi menjadi tema sentral. Sehingga kharisma kiai menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan kepercayaan santri terhadap kiai terutama di pesantren modern menjadi berkurang pula. Selain itu berkurangnya peranan kiai dalam proses pembelajaran santri di pesantren menyebabkan menurunnya ketergantungan santri terhadap kiai.

Peneliti pula menyajikan gambar pola perilaku politik santri berdasarkan kepercayaan dan kepatuhannya kepada kiai, yang dibagi menjadi tiga kategori santri yaitu santri patuh mutlak, santri patuh semu, dan santri prismatic. Ketiga kategori santri tersebut melekat pada santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dapat mempengaruhi pilihan politik santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame dan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020. Gambar dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SIMPULAN

Santri di pondok pesantren baik tradisional yaitu Assalafiyah Tajung Rame maupun modern yaitu Ushuluddin memiliki perilaku politik yang berbeda. Adanya perbedaan dalam mempertimbangkan pilihan politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Santri Assalafiyah Tajung Rame sangat dipengaruhi organisasi masyarakat/ ormas dan partai yang di ikuti kandidat, serta agama kandidat. Berbeda dengan santri Ushuluddin, santri tidak menjadikan ormas, partai bahkan agama sebagai menentukan pilihan politik. selain itu, adanya perbedaan dalam kepercayaan kepada kiai yang mempengaruhi pilihan politik santri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020. Berdasarkan kepatuhannya, santri Pondok Pesantren Assalafiyah Tajung Rame dikategorikan sebagai santri patuh mutlak dengan mengikuti segala pilihan kiai termasuk pilihan politik dan tidak memiliki keberanian untuk berbeda pilihan politik dengan kiai karena kungkungan moral yang tertanam di pesantren. Berbeda dengan santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin memperlihatkan modernisasi menyebabkan santri mengalami transisi cara berfikir tradisional ke modern. Santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin tidak lagi menjadikan perilaku politik dan pilihan politik kiai sebagai rujukan dalam menentukan pilihan politik.



Sumber : Data Primer yang diolah oleh peneliti tahun 2020

Gambar 2 : Pola Perilaku Politik Santri Berdasarkan Kepatuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, M. Van. (2008). *The Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia*. 217–245.
- Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka.
- Ilham, M. (2020). Pemberdayaan Politik Santri pada Pilwali di Surabaya. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, Juni 2020, 23(1).
- Katon, G. (2020). Peran Pesantren Modern dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Santri. *Journal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Najib Kailani & Sunarwoto. (2017). *Televangelisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP).
- Nasaruddin, U. (2019). *Islam Nusantara : Jalan Panjang Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Medianusantara (2020). *Pilkada Lampung Selatan diikuti tiga Paslon*. Diakses 9 Oktober 2020 dari <https://www.medianusantaranews.com/2020/10/09/resmi-pilkada-lampung-selatan-diikuti-tiga-paslon/>
- Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama*. (2019).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. (n.d.).
- Sarjan. (2020). *Problematisasi Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19* (Vol. 3, Issue 1).
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudahri, S. (2018). Tradisi Komunikasi Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Pondok Pesantren Modern. *Mediakom*, 1(2), 129–141. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1573>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Bandung: PT. Grasindo Utama.
- Syarif, Z. (2012). Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri. *Tadris*, 7.
- Syarif, Z. (2016). Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 293. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>
- UU No. 10 Tahun 2016. (n.d.). *tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020*.
- Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pondok pesantren Terpadu Ushuluddin. (2020)
- Wawancara dengan Santri Pondok Pondok pesantren Terpadu Ushuluddin. (2020).